

Peran Agama sebagai Directive System dan Defensive System dalam Mempersiapkan Kualitas Manusia Indonesia pada Era Persaingan Global

Dochak Latief¹⁾

(Tulisan ini merupakan Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar IKIP Yogyakarta, diedit seperlunya dan disesuaikan dengan Tema Jurnal Al-Mawarid Edisi ketujuh. Diedit kembali oleh Dadan Muttaqien)

Pendahuluan

Indonesia termasuk salah satu negara yang menganut *outward looking policy* yang memberi bobot cukup penting pada transaksi ekonomi internasional. Oleh karena itu tidak mungkin lagi Indonesia surut dari arena ekonomi global dengan segala konsekuensinya. Sebagian besar para pesaing Indonesia di pasar global lebih kuat dalam permodalan, teknologi, dan jaringan pasar internasional. Indonesia selalu berusaha memperkuat daya saingnya di pasar internasional dan memperkuat perekonomian dalam negeri termasuk menghadapi serangan investor asing yang semakin gencar di era perdagangan bebas abad 21 mendatang.

Salah satu kunci penting menghadapi kesemuanya itu ialah meningkatkan kualitas

sumber daya manusia Indonesia yang diarahkan pada ciri-ciri utama seperti: kreatif, inovatif, adaptif dan fleksibel, tanpa kehilangan kepribadian Indonesia. Tantangan masa depan menjadi tanggung jawab seluruh bangsa. Di bidang pendidikan dan ekonomi terutama menjadi tanggung jawab keluarga, lembaga pendidikan, dan dunia usaha, baik pemerintah maupun swasta.

Mengerti ekonomi dengan keluasan dan kedalaman yang berbeda-beda menjadi salah satu tanggung jawab pendidikan ekonomi. Makin kompleksnya kehidupan ekonomi, makin diperlukan pengertian tentang ekonomi yang semakin baik bagi setiap warga negara, apakah dalam peranannya sebagai konsumen, sebagai penerima pendapatan, sebagai penabung, ataupun sebagai investor dalam menghadapi masa depan mereka.

Dalam tulisan ini akan digambarkan selintas peran ekonomi dunia terhadap perekonomian

¹⁾ Prof. Drs. H. Dochak Latief adalah Guru Besar IKIP Yogyakarta dan Rektor UMS Surakarta

Indonesia. Juga akan digambarkan peran sumber daya manusia Indonesia dan peran pendidikan ekonomi dalam mensukseskan pembangunan ekonomi dalam arena ekonomi global yang berubah dengan cepat dan tidak menentu.

Persaingan Global sebagai Tantangan dan Kesempatan

Globalisasi ekonomi dimaksudkan sebagai proses terintegrasinya perekonomian negara-negara ke arah masyarakat ekonomi dunia yang saling terikat, saling tergantung, dan saling pengaruh mempengaruhi. Globalisasi ekonomi diperhatikan oleh saling tergantungnya atau bahkan terintegrasinya kegiatan produksi, investasi, kredit maupun perdagangan, dan pemasaran antar negara, sehingga menjadi satu kesatuan ekonomi. Proses globalisasi sebenarnya sudah terjadi sekitar 35 tahun yang lalu, atau sejak pertengahan tahun 60-an sampai sekarang.

Selanjutnya proses globalisasi sejak tahun 90-an sampai sekarang maupun mendatang diperkirakan semakin bertambah cepat sehingga oleh John Naisbitt di sebut sebagai era baru globalisasi. Benar juga apa yang dikatakan oleh Colin Rose bahwa dunia sedang berubah dengan kecepatan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehidupan masyarakat termasuk kehidupan ekonominya menjadi semakin kompleks. Dunia kerja mengalami perubahan secara radikal, dan jenis-jenis pekerjaan tertentu hilang tak terduga. Masa lalu tinggal sedikit, dan hanya sedikit memberi arah masa depan (Colin Rose and Malcolm J. Nicholl, 1997:1).

Globalisasi ekonomi tidak terpisah dari segi-segi kehidupan yang lain seperti segi politik-keamanan, militer, sosial, budaya, maupun bidang kehidupan lainnya. Sekarang ini globalisasi telah meliputi segala aspek kehidupan

manusia dalam masyarakat, akibatnya permasalahan yang terkait di dalamnya menjadi sangat kompleks dan makin sulit dipisahkan satu sama lain.

Khusus di bidang ekonomi, sejak tahun 60-an telah terjadi beberapa perubahan penting yang mengharuskan setiap negara meningkatkan kemampuannya menghadapi permasalahan yang menghadangnya:

1. Saling Ketergantungan Antarnegara Semakin Besar

Hal tersebut antara lain diperlihatkan oleh makin besarnya angka *index of openness* yang dialami oleh hampir semua negara. Angka ini menunjukkan persentase besarnya ekspor sebagai bagian dari GNP suatu negara. Steven Husted menggambarkan perkembangan angka tersebut sebagai berikut. Di tahun 1965 angka *index of openness* antar negara berkisar antara 10-30, dan rata-rata angka tersebut sebesar 22 (tahun 1965). Pada 1991 angka tersebut menjadi 31. Bagi kelompok negara-negara berkembang dari rata-rata 16 (1965) menjadi 20 (1991). Bagi negara-negara kelompok menengah angka rata-ratanya meningkat dari 21 (1965) menjadi 29 (1991); sedangkan bagi negara-negara berpenghasilan tinggi (negara maju), angka tersebut bertambah dari 29 (1965) menjadi 44 (1991).

Pertumbuhan transaksi ekonomi internasional sejak tahun 1960-an berkembang jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kemakmuran ekonomi dunia. Dari tahun 1950-1973, GNP naik 200% sedangkan ekspor dunia meningkat 500%. Dari 1973-1989, GNP meningkat 400% sedangkan ekspor meningkat sebesar 1000% (Steven Husted & Michael Melvin, 1995:9-10).

Dalam periode waktu yang hampir sama ternyata tingkat pertumbuhan ekonomi dunia

mengalami penurunan. Dalam dekade 1960-an perekonomian dunia dapat tumbuh rata-rata 5%, sesudah dikoreksi dengan tingkat inflasi. Dalam dekade 1970-an perekonomian dunia hanya tumbuh 3,6% dan di tahun 1980-an hanya tumbuh 2,8%, dan di pertengahan pertama tahun 1990-an tumbuh 2% per tahun (Lester C Thurow, 1996:1).

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa peran transaksi ekonomi dunia semakin penting artinya bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Ternyata pula semakin maju suatu negara ketergantungannya pada ekonomi dunia justru semakin besar. Negara Indonesia, termasuk semua negara ASEAN (*Association of South East Asian Nations*), juga mempunyai kecenderungan yang sama. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.

Tabel 1 Angka *Index of openness*

Negara	Angka <i>Index of Openness</i>		
	1965	1991	1996
Indonesia	5	27	23
Filipina	17	30	23,3
Thailand	16	38	31,2
Malaysia	42	81	82,2
Singapura	123	185	132,5

Sumber : Angka *index th. 1965 dan 1991*; Steven *usted, 1995: 5-7 dan Angka index th. 1996, Asia Week 9-5-97;72.*

Besar kecilnya sifat ketergantungan suatu negara pada perekonomian dunia, selain ditentukan oleh besar kecilnya angkat *index of openness*, juga ditentukan oleh banyak hal, antara lain:

a. Besarnya ekspor dan impor sebagai bagian dari GNP suatu negara. Yang menjadi penyebab keterkaitan antara ekspor dan impor sangat besar, terutama negara-negara yang tidak mempunyai sumber alam seperti Jepang, Singapura, Hongkong dsb. Bagi negara-negara berkembang yang sedang memperbaiki struktur komoditi ekspornya dari hasil

pertanian dan bahan mentah ke barang-barang industri; masih terkait sekali dengan kemampuannya mengimpor barang-barang modal dan bahan baku bagi komoditi yang akan diekspor.

- b. Besar kecilnya peran sumber dana luar negeri bagi APBN dan permodalan swasta, maupun besar kecilnya peran investasi asing bagi investasi keseluruhan di negara tsb.
- c. Besar kecilnya pengaruh perubahan harga-harga di pasar dunia terhadap harga-harga di negara tersebut, termasuk perubahan harga yang ditimbulkan oleh perubahan kurs mata uang negara tersebut menghadapi valuta asing. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh perubahan kurs Peso, Bath, Ringgit Malaysia, dan Rupiah terhadap US \$, yang tengah terjadi sejak Juni 1997 sampai sekarang, ternyata pengaruhnya cukup besar. Keadaan tersebut berpengaruh terhadap harga, tingkat inflasi, tingkat bunga bank, goncangan pasar modal, cadangan devisa, dan situasi neraca berjalan di negara-negara tersebut.
- d. Kemampuan negara untuk melakukan restrukturisasi atau penyesuaian struktur industri-industri yang penting.

Menghadapi era liberalisasi dengan persaingan yang semakin ketat setiap negara perlu memperkuat posisinya masing-masing Negara Indonesia hampir di semua posisi tersebut sampai sekarang masih rawan keadaannya.

2. Ketergantungan dan Kesenjangan Ekonomi

Semakin besar peran transaksi ekonomi luar negeri suatu negara, cenderung mengakibatkan semakin memburuk kesenjangan ekonomi dalam masyarakatnya, terutama dialami oleh negara-negara sedang berkembang. Hal ini telah

banyak diungkapkan dalam hasil penelitian, di antaranya David Richardson menyimpulkan bahwa perdagangan internasional memberikan andil secara terbatas terhadap terjadinya ketidakmerataan pendapatan. Pengaruh itu cukup kuat dalam jangka pendek menyusul terjadinya guncang-n harga-harga atau guncangan penawaran di pasar internasional. Apabila perniagaan internasional suatu perekonomian mengalami pertumbuhan, maka kemungkinan ada sektor ekonomi lain yang justru mengalami penurunan.

Hal ini berarti terjadi dislokasi struktural yang menyebabkan penderitaan yang timbul dari berbagai sebab, yaitu: perdagangan, teknologi, perubahan selera, dsb. Dia mengaitkan penyebab-penyebab yang bersifat transisi, yang menitikberatkan selalu terjadinya berbagai kesulitan dan terjadinya distorsi (penyimpangan-penyimpangan) dalam dinamika penyesuaian pasaran kerja (David Richardson, 1995: 35, 44 dan 51). Harland Prechel dalam penelitiannya bahkan menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang yang berorientasi pada ekspor selain menyebabkan meningkatnya ketidakmerataan juga menyebabkan makin membengkaknya hutang luar negeri (Harland Preche, 1985:227-229). Lebih jauh lagi dapat dilihat dari mereka yang berperan sebagai eksportir maupun importir, yang sekaligus juga pemegang peran pertumbuhan ekonomi.

Di Korea Selatan mereka adalah sekelompok kecil konglomerat ekonomi atau *Chaebol*, dimana 4 besar dari mereka (Samsung, Hyundai, Lucky-Gold Star, dan Daewoo), mempunyai pangsa penjualannya mencapai 1/2 GNP Korea Selatan, (Paul Kennedy, 1993:197). Sedangkan GNP di Indonesia 61% disumbang oleh hanya 0,2% dari unit-unit usaha besar dan menengah, 76% terdiri dari sekitar 300 konglomerat. Di antaranya 38 konglomerat menguasai 44%. Grup

Salim sendiri menguasai 8,3% (Didin S. Damanhuri "Bunga Tinggi Siapa Untung", *Gatra* 7 Desember 1996:12-13).

3. Makin Terpinggirkannya Program GNB

Bersamaan dengan makin banyaknya negara-negara berkembang mengikuti model pembangunan ekonomi liberal-kapitalistik, dan makin terpusatnya perhatian negara-negara terhadap Ekonomi Regional melalui AFTA (*Asean Free Trade Association*), LAFTA (*Latin American Free Trade Association*), UDEAC (*Union Douanier vi et Economique d'Afrique Centrale*), APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) dsb., perjuangan negara berkembang dan negara miskin melalui GNB (*Gerakan Non Blok*) semakin kurang mendapat perhatian. Padahal tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Selatan (negara berkembang dan negara miskin) bukannya makin ringan, tetapi justru semakin berat, yang tak mungkin diperjuangkan oleh negara-negara secara sendiri-sendiri. Tantangan-tantangan tersebut meliputi:

- a. Memperkukuh kembali dalam kata-kata dan tindakan demi terwujudnya tujuan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, dengan mengarahkan pertumbuhan ekonominya untuk mencukupi kebutuhan dan memenuhi tujuan-tujuan yang lain.
- b. Memperkuat lembaga-lembaga demokrasi agar rakyatnya dapat hidup merdeka dan memecahkan jalan hidup mereka sendiri dalam kiprah pembangunan yang sesuai dengan budaya dan nilai-nilai hidupnya.
- c. Memanfaatkan sumber-sumber daya mereka secara lebih efektif untuk mempercepat pembangunan, dengan memberi prioritas

kebutuhan dasar rakyatnya dan membebaskan mereka dan kemelaratan, penyakit, kebodohan, dan ketakutan.

- d. Memberikan kemampuan rakyat dalam merealisasikan bakat mereka secara penuh serta kemampuan kreativitasnya, sehingga mengembangkan kepercayaan diri mereka. Akibatnya rakyat makin terpacu dalam mewujudkan kesejahteraan dan pertumbuhan masyarakatnya.
- e. Meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.
- f. Mengejar perkembangan rakyatnya dengan memperhatikan keselamatan lingkungan hidup agar dilestarikan bagi kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang.
- g. Mengorganisasikan negara-negara Selatan secara efektif untuk memperoleh kekuatan melalui usaha kerjasama yang lebih luas antarnegara Selatan dengan keuntungan sumber-sumber daya yang saling melengkapi serta meningkatkan kemandirian yang bersifat kolektif.
- h. Memanfaatkan kesatuan dan solidaritas antarnegara Selatan dalam usaha membuat dunia lebih adil dan lebih aman untuk masing-masing rakyatnya. Ini dapat dicapai melalui restrukturisasi hubungan-hubungan global yang tanggap terhadap meningkatnya saling ketergantungan yang makin mendalam antar-bangsa dan rakyat dunia, sebagai anggota keluarga kemanusiaan dalam kehidupan global. Tantangan-tantangan tersebut adalah sangat hebat, tetapi harus dapat diatasi (Julius K. Nyerere, 1990:23-24).

Tantangan-tantangan tersebut masih sangat relevan untuk diperhatikan, karena sampai

sekarang ini hampir-hampir belum ada yang dapat dicapai secara penuh. Hal ini terkait langsung dengan problematika pertama maupun kedua. Para pelaku ekonomi perlu diingatkan agar tidak terlena dengan pola permainan ekonomi liberal yang dikenal dengan *Zero sum game* yang menggambarkan bahwa dalam transaksi ekonomi pasti ada pihak yang menang, dan ada pihak yang kalah (Lester C. Thurow, 1981:11). Dalam bukunya yang lain dia menggambarkan bahwa semakin cepat pertumbuhan ekonomi maka *the losers* (pecundang) jumlahnya akan semakin banyak, terutama diderita oleh para penerima upah (Lester C. Thurow, 1996:237).

Karena itulah maka perjuangan menghadapi *zero sum game* di arena pasar bebas dengan persaingan yang semakin tajam, dan perubahan situasi ekonomi dunia yang semakin cepat yang kerap kali tidak terduga arahnya, diperlukan berbagai usaha secara simultan. Ini dapat dicapai melalui lembaga-lembaga ekonomi internasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, Gerakan Non Blok, atau Persatuan Negara-negara Selatan, WTO (*World Trade Organization*) dsb. Juga melalui lembaga-lembaga ekonomi regional seperti ASEAN, AFTA, maupun APEC. Di samping itu yang terpokok ialah memperkuat posisi Indonesia di pasar global, dengan memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia menghadapi serangan investor asing yang masuk ke pasar domestik. Kesemuanya itu dilaksanakan tanpa melepaskan tujuan pembangunan nasional yaitu pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan disertai keadilan dan pemerataan pendapatan, yang terkait secara langsung dengan pembangunan ekonomi yang berdimensi kerakyatan.

Basis memperkuat perekonomian Indonesia ke luar maupun ke dalam, ialah perbaikan

kualitas manusia sebagai kekuatan terpenting bangsa menghadapi masa depan. Manusia yang berkualitas itulah yang akan mampu mengubah tantangan menjadi peluang untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Sumber daya alam maupun modal difungsikan sebagai prasarana dan sarannya.

Kualitas Manusia Indonesia sebagai Pewaris Masa Depan

Berbicara soal kualitas manusia tentu saja tidak terlepas dari pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan pembimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang (UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I, pasal 1.1). Jadi pendidikan selalu terkait dengan usaha mempersiapkan anak didik menghadapi masa depan dengan segala tantangan dan peluang bagi dirinya, keluarga dan bangsanya bahkan untuk kemanusiaan pada umumnya (*rahmatan lil alamin*). Ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAW yang menyatakan: "Didiklah anak-anakmu, karena mereka itu dijadikan sebagai manusia untuk menghadapi zaman yang bukan zamanmu". Dalam hadits yang lain dikatakan didiklah anak-anakmu dengan pendidikan berenang dan memanah, dan untuk anak perempuanmu dengan pendidikan keterampilan menenun. Dengan dua hadits tersebut terlihat sikap antisipatif Islam tentang akan adanya perubahan yang sangat drastis.

Kualitas manusia Indonesia yang bagaimana yang akan mampu menghadapi hidup masa depan dengan segala tantangan dan peluangnya? Jawaban atas pertanyaan tersebut pasti tidak akan pernah tepat dan hanya bersifat tentatif, dan tidak pernah final, mengingat peru-

bahan hidup di segala bidang yang semakin cepat. Namun dapat dipastikan bahwa peranan ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin menentukan perkembangan hidup masyarakat. Hal itu berkaitan langsung dengan makin pentingnya peranan perguruan tinggi. Dalam deklarasi Manila yang antara lain ditegaskan: "*Higher education, we are convinced, is a key element in the development of the human power needed for the next millennium. For us, human resource development is first and at heart the development of the human person totally, socially, holistically*" (Manila Declaration June 23-25, 1997).

1. Pengaruh Negatif Budaya Materialistik

Keterbukaan ekonomi suatu negara mempunyai dampak yang sangat luas. Ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Yang termasuk pengaruh positif ialah:

- a. Terjadinya penyebaran teknologi.
- b. Meningkatkan angka *multiplier* yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih cepat.
- c. Membawa keuntungan bagi perusahaan-perusahaan tertentu melalui perluasan pasar luar negeri.
- d. Memperbanyak pilihan barang-barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen.
- e. Menurunkan biaya produksi dengan menggunakan bahan-bahan baku dan/atau barang modal impor yang mungkin lebih murah. Di samping pengaruh yang positif ada pengaruh yang negatif, di antaranya masuknya budaya dan sikap hidup asing dalam masyarakat (Robert Gilpin, 1987:171-172). Budaya asing yang baik seperti kerja keras, penghargaan terhadap waktu, rasional dan keterbukaan. Tetapi banyak juga pengaruh negatifnya di

antaranya ialah sikap hidup materialistik, yang mengukur kehidupan hanya dengan nilai-nilai yang dapat dikuantitatifkan dengan bobot moneter.

Dikatakan Heru Nugroho bahwa uang telah menjadi instrumen yang memiliki kekuasaan yang luar biasa. Bahkan kekuasaan itu dapat ditransfer menjadi kekuasaan personal bagi yang memilikinya. Konsep "duit iku kuasa" saat ini dipahami sebagai pembalikan fungsi uang, dari sebagai *instrumen (means)* menjadi uang sebagai tujuan (*end*). Simmel menangkap gejala seperti ini sebagai: "*the tragedey of modern culture*" (Heru Nugroho, Bernas 7-5-1997). Dalam situasi seperti ini ada dua peran agama yang signifikan untuk dikembangkan, yaitu peran sebagai *directive system* dan *defensive system*.

Dalam *directive system* agama ditempatkan sebagai referensi utama dalam proses perubahan masyarakat, yaitu sebagai *supreme morality* yang memberi landasan dan kekuatan etik spiritual bagi masyarakat ketika berdialektika dalam proses perubahan. Agama dijadikan daya dorong bagi terciptanya perubahan yang konstruktif dan humanistik bagi masa depan umat manusia. Dalam perannya sebagai *defensive system*, agama menjadi kekuatan resistensial bagi masyarakat ketika berada dalam lingkaran kehidupan yang semakin kompleks di tengah derasnya arus perubahan (Syamsul Arifin, *Republika* 6 dan 7 Mei 1997).

Dengan demikian apabila masyarakat berhadapan dengan sistem nilai yang baru, seperti nilai budaya Barat yang materialistik-individualistik dan permissif, mereka tidak akan tenggelam serta hanyut mengikutinya, karena sudah mempunyai sumber sistem nilai yang menjadi acuan hidupnya. Tentu saja hal tersebut akan bisa efektif apabila ada keteladanan dari para pimpinan masyarakat formal maupun non

formal. Mereka yang dijadikan sebagai *reference group* (kelompok percontohan), apakah sebagai birokrat, cendekiawan, atau pengusaha sukses. Mereka merupakan kelompok elit, yaitu kelompok yang relatif kecil tetapi mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu, dibandingkan warga masyarakat pada umumnya.

Di samping itu diperlukan *raushan fikr* atau pemikir yang tercerahkan yaitu para cendekiawan yang melibatkan diri dalam pembentukan ideologi dan *weltanschauung* masyarakat, serta perjuangannya mengatasi kondisi-kondisi buruk kemanusiaan dan kebudayaannya, untuk merekonstruksi pemikiran agama (Islam). Merekalah orang-orang yang mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran dan memberi arah intelektual dan sosial kepada masyarakat. Mereka mengajarkan masyarakat bagaimana cara mereka berubah dan ke arah mana suatu transformasi sosial dan budaya akan berlangsung, memberi jawaban atas pertanyaan akan ke mana kita ini (Abdul Hadi WM, *Ulumul Qur'an* Vol. 2, 1989:30-31). Secara jelas Presiden Soeharto menyatakan bahwa agama adalah landasan etika, moral, dan spiritual pembangunan bangsa kita. Ini berarti peranan ajaran agama tidak kalah pentingnya dengan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan pembangunan. Tanpa landasan etika, moral, dan spiritual maka setiap kegiatan ekonomi serta pembangunan dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat (Presiden-Soeharto: *Angkatan Bersenjata* 14-4-1997).

2. Berfikir dan Belajar sebagai Sumber Daya Baru

Siapakah yang mampu menjadi pewaris masa depan? Colin Rose berpendapat bahwa hanya anak-anak, pribadi, perusahaan, dan

bangsa-bangsa yang berkembang pemikiran kreatif-analitisnya yang akan mewarisi abad 21. Berpikir dan belajar adalah sumber daya alam baru dan sumber mata air kemakmuran. Mereka harus memegang pimpinan dalam belajar, berpikir dan menciptakan sesuatu berhadapan dengan para pesaing mereka (Colin Rose & Malcom J. Nicholl, 1997:192). Khusus untuk lulusan Perguruan Tinggi menurut Ulrich Teicher, persyaratan kualitasnya meliputi sifat dan kemampuan sebagai berikut:

- a. fleksibel;
- b. mampu dan bersedia untuk berpartisipasi dalam inovasi serta menjadi kreatif;
- c. mampu menguasai hal-hal yang tidak menentu atau seringkali berubah-ubah;
- d. tertarik dan siap belajar seumur hidup;
- e. mempunyai kepekaan sosial dan ketrampilan komunikasi;
- f. mampu bekerja dalam tim;
- g. mampu mengambil tanggung jawab yang diserahkan kepadanya;
- h. mampu menyiapkan diri untuk melakukan internasionalisasi pasaran kerja melalui pengertiannya tentang macam-macam budaya;
- i. dapat *versatile* (cakap dalam berbagai hal) dalam ketrampilan yang bersifat umum (*generic*) yang melewati perbedaan disiplin dan melekat dalam berbagai bidang pengetahuan serta dalam bentuk dasar berbagai keterampilan profesional.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Ulrich Teicher dalam hal ini:

- a. Diasumsikan bahwa ilmu pengetahuan profesional yang terspesialisasi lebih cepat menjadi tertinggal dan kuno.
- b. Tumbuhnya banyak profesi dan posisi dalam perusahaan maupun dalam lembaga publik

yang tidak jelas batas dan dasar ilmunya yang berasal dari macam-macam disiplin, hingga menyulitkan perguruan tinggi untuk menyiapkan posisi-posisi tersebut.

- c. Masifikasi perguruan tinggi dan problem-problem ketenagakerjaan pada umumnya, serta dinamika perubahan perekonomian, yang memungkinkan terjadinya *mismatch* antara keterampilan lulusan perguruan tinggi dengan permintaan kerja, hingga diperlukan fleksibilitas (Ulrich Teicher, 1997:54-55).

Soedjatmoko menggambarkan sifat-sifat dan kemampuan yang harus dimiliki manusia Indonesia di masa mendatang ialah:

- a. Dia harus serba tahu atau "well informed". Dia harus menyadari bahwa proses belajar tidak akan pernah selesai (*life-long-learning*) di dalam dunia yang terus berubah secara sangat pesat. Dia harus mampu mencerna informasi yang banyak sekali dan mampu mencernakannya secara tuntas. Hal itu memerlukan selain kemampuan analisis yang tajam, juga kemampuan besar untuk berpikir secara integratif dan konseptual, agar memungkinkan bereaksi cepat, dengan "response time" pendek.
- b. Kemampuan bersikap kreatif dalam memberikan jawaban terhadap tantangan baru, dan secara bersama berkemampuan mengantisipasi perkembangan dan siap berinovasi. Konformitas merupakan bahaya terbesar untuk perkembangan kreativitas yang disertai keberanian bertanggung jawab.
- c. Kepekaan terhadap keadilan sosial dan solidaritas sosial.
- d. Peka terhadap batas-batas toleransi masyarakat, terhadap perubahan sosial, dan terhadap ketidakadilan.
- e. Memiliki harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri berdasarkan iman yang kuat.

- f. Sanggup mengidentifikasi dimensi-dimensi moral dan etis dalam perubahan sosial atau pilihan teknologi serta sanggup menalar secara moral (*moral reasoning* atau *ijtihad*) dan mampu menginterpretasikan ketentuan-ketentuan agama sehingga terungkap relevansinya untuk masalah dan perkembangan-perkembangan baru (Soedjatmoko, 1991:97-99).

3. Kualitas Manusia Indonesia sebagai Pewaris Masa Depan

Dari berbagai sumber kajian tentang kualitas manusia yang ideal yang diperkirakan mampu menghadapi hidup masa depan yang semakin rumit dan tidak menentu ialah mereka yang memiliki beberapa sifat utama sebagai berikut:

- a. Mampu meningkatkan produktivitas kerja dalam arti *labor productivity* maupun dalam arti *multifactor productivity*. Keduanya menggambarkan tingkat efisiensi suatu kegiatan ekonomi dalam mendayagunakan *input* yang berupa sumber daya manusia, modal (yang tercermin dalam teknologi yang digunakan), perbaikan keterampilan dan motivasi kerja, maupun teknik manajerial yang lebih unggul.
- b. Memiliki kemampuan berpikir kreatif dan berpikir analitis. Berpikir kreatif dimaksudkan kemampuan menemukan cara-cara baru untuk menyatakan sesuatu, mengkombinasikan idea-idea yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang baru atau yang lebih baik. Sedangkan ciri-ciri berpikir kreatif analitis ialah berpikir imajinatif, logis, konsisten, serta berpandangan yang luas. Kedua kemampuan berpikir tersebut amat diperlukan secara serempak. Berpikir kreatif untuk memecahkan problem, dan berpikir analitis untuk memutuskan

macam-macam kemampuan kreatif mana yang paling baik (Colin Rose dan Nicholl, 1997:191-192).

Ternyata kedua kemampuan tersebut tidak mudah diwujudkan. Ada budaya masyarakat yang lebih berorientasi pada keberhasilan hidup, yang mampu mendorong seseorang berfikir kreatif, tetapi ada pula lingkungan budaya masyarakat yang lebih berorientasi kebersamaan. Menurut Torrance, budaya masyarakat yang berorientasi kebersamaan dapat berpengaruh merintang berfikir kreatif, dan menjerumuskan pada sikap menyesuaikan diri. Mereka umumnya takut berfikir sebelum menemukan bahwa temannya juga sedang berfikir (E. Paul Torrance, 1963:16-18). Pendapat Paul Torrance ini tidak berbeda dengan pendapat Soedjatmoko yang mengatakan bahwa konformisme sebagai salah satu perusak kreativitas terbesar, oleh karena itu harus dihilangkan (Soedjatmoko, 1991:99).

Untuk mengusahakan terwujudnya semboyan: "*I think therefore I earn*", pemerintah Singapura merencanakan anggaran lebih dari \$ 1 milyar selama 5 tahun mendatang untuk memajukan pemikiran yang inovatif dan berfikir *problem solving* di kalangan rakyatnya.

Sebagian dari uang tersebut akan digunakan untuk pilot proyek yang meliputi 6 buah SLTA agar para siswanya berfikir independen, dan aplikasi kreativitas dalam kelas yang dibuat seperti kehidupan sehari-hari. Singapura sebenarnya sudah lama menghasilkan orang-orang yang terdidik dengan baik, efisien, disiplin, dan sebagai pekerja handal. Negara tersebut tidak lagi sekadar meningkatkan produksi massal dengan harga rendah, tetapi ingin membuat berbagai jenis produk baru yang dapat dipasarkan dengan cepat dan lebih

mudah dengan teknologi tinggi. Kesemuanya itu memerlukan kekuatan otak dan unsur-unsur kreativitas (*Asia Week*, 10-1-1997: 35 dan 41).

- c. Memiliki ilmu dasar yang luas serta keterampilan kerja yang tinggi.
- d. Kesiapan untuk belajar sepanjang hidup (*life long learning*) agar dapat meningkatkan kemampuannya secara berkelanjutan.
- e. Fleksibilitas dan adaptif, yang keduanya diperlukan untuk menghadapi berbagai perubahan yang cepat.
- f. Moralitas yang baik yang bersumber pada agama yang diyakini ataupun yang bersumber pada sistem nilai yang bersifat universal, yang dikenal dengan *The Golden Rule* yang berintikan sikap hidup yang tidak menghendaki kerusakan atau kerugian orang lain dan mencintai tetangganya seperti mencintai dirinya sendiri. Menghadapi perubahan teknologi yang secara potensial mempunyai dampak positif dan negatif, dibutuhkan komitmen terhadap prinsip-prinsip moral yang semakin kuat. Diyakini pula bahwa sekolah berada di garis terdepan untuk mewujudkannya (Marianne Frostig, 1976: 182).
- g. Dari segi orientasi hidup, generasi muda diharapkan memiliki keseimbangan antara orientasi keberhasilan dan orientasi kebersamaan. Orientasi keberhasilan mendorong seseorang berusaha keras mempersiapkan diri dan memiliki motivasi untuk berhasil tetapi diimbangi dengan nilai-nilai kekeluargaan atau kegotong-royongan masyarakat religius.

Ciri-ciri di atas sebenarnya mencerminkan kepribadian manusia seutuhnya jasmani maupun ruhani, yang meliputi keilmuan, ketrampilan, kejelasan nilai-nilai hidup, dan moralitas yang tinggi.

Peran Pendidikan Ekonomi Menghadapi Tantangan Global

Pendidikan ekonomi semakin penting artinya mengingat setiap orang, setiap rumah tangga sekarang ini secara langsung atau tidak langsung akan turut merasakan akibat positif maupun negatif situasi ekonomi global, di samping permasalahan ekonomi mikro maupun makro yang semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan kesadaran yang lebih tinggi tentang kehidupan ekonomi, baik tentang ekonomi pribadi, keluarga, maupun ekonomi masyarakat dan negara pada umumnya.

Pendidikan ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan dari pendidikan dalam arti luas, yaitu usaha mengadakan perubahan pada diri seseorang yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai tertentu. Para peserta didik ingin memiliki pengertian, wawasan, dan apresiasi (Jack R. Fraenkel, 1971:21). Dengan demikian cakupan pendidikan ekonomi meliputi tiga hal pokok yaitu:

- a. Tujuan pendidikan ekonomi
- b. Strategi kurikuler
- c. Kegiatan pengajaran atau proses belajar mengajarnya.

Sebagai sebuah ilmu, tujuan pendidikan ekonomi selain mempunyai fungsi khusus di bidangnya, juga mempunyai fungsi sebagai ilmu pada umumnya yaitu:

- a. Menerangkan
- b. Meramalkan, dan
- c. Mengendalikan.

Tugas menerangkan dimulai dengan mengadakan pertelaan terhadap gejala-gejala dalam wilayah ilmu yang bersangkutan. Tugas ramalan atau prediksi sedikitnya dapat mengambil dua bentuk, yaitu *forecast* dan

projection. Dalam tindakan pengendalian, unsur-unsur negatif atau faktor-faktor yang merugikan dicoba dieliminasi sebanyak-banyaknya, sedangkan unsur-unsur positif atau faktor-faktor yang menguntungkan perkembangan dicoba dipelihara dan dikembangkan (Sutrisno Hadi, 1977:69-70). Menurut pandangan Islam selain ketiga fungsi tsb., ilmu pengetahuan masih mempunyai fungsi penting lainnya, ialah agar manusia sebagai hamba Allah lebih mampu melaksanakan amanah-Nya sebagai *khalifatullah fil ardh* (wakil Allah SWT di bumi).

Dengan konsep-konsep, teori, dan data yang dimiliki seseorang, diharapkan mampu membuat perkiraan dan gambaran apa yang dapat terjadi di waktu mendatang. Dengan teori-teori yang dimiliki, seseorang memiliki peta hidup yang jelas, sehingga dapat berusaha melakukan pengendalian dan perbaikan dalam berbagai masalah hidup.

Dengan pengetahuan ekonomi yang dimiliki, seseorang dapat mengambil keputusan secara lebih rasional, dan mempertimbangkan nilai-nilai hidup yang diyakininya.

Menurut James A. Banks, seseorang yang akan mengambil sesuatu keputusan, selain mendasarkan pertimbangan keilmuan (melalui berbagai konsep dan teori yang dimilikinya) juga diperlukan adanya kejelasan nilai (*value clarification*) (James A. Banks, 1974:33).

Menurut A. Syahirul Alim untuk mengambil suatu keputusan diperlukan eksplorasi ketiga potensi rohaniyah manusia, yaitu rasio, rasa, dan iman. Dengan mengeksplorasi ketiga potensi tersebut akan menentukan keutuhan, kesempurnaan, dan kebenaran arah hidupnya yang sejalan dengan ketentuan Allah SWT (RHA. Syahirul Alim, 1983:69).

Keputusan yang demikian, searah dengan apa yang disebut *mizan* yang di dalam Al-Qur'an

(Q.S. 42:17) yang artinya: "Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan)". Istilah *mizan* dalam Al-Qur'an menurut Al-Ghazali ialah keseimbangan, yang menunjukkan hal-hal yang logis. Logis ialah keseimbangan di mana manusia menimbang idea-idea dan opini untuk mencapai pertimbangan yang benar dan adil. Penggunaan logika dalam Islam tidak mengarah pada rasionalisme dan logikalisme yang ditemui di Barat Modern, sebab penggunaan *reasoning* tidak pernah dapat memutuskan (*cut off*) keyakinan Muslim terhadap wahyu Ketuhanan. Para cendekiawan muslim selalu diilhami kesadaran agama yang kuat dan kesadaran transendental. Dalam Islam semua kebenaran adalah relatif, kecuali hanya kebenaran dari Allah SWT (Osman Bakar, 1991:4). Kemerdekaan akal dalam Islam tidak akan menumbuhkan sikap *takkabur* (kesombongan) yang mendewa-dewakan rasio, sebab masih banyak hal yang harus kita terima "*bila kaifa*" (tanpa bertanya mengapa) Moh. Natsir, 1970:22).

Dengan pendidikan ekonomi yang mencakup ilmu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) baik keterampilan teknik maupun keterampilan sosial, sikap (*attitude*) yang jelas, serta memiliki keyakinan sistem nilai (*values*) tertentu, diharapkan para pelaku ekonomi dapat aktif dalam kegiatan ekonomi dengan selalu berpegang teguh pada etika ekonomi yang benar, dan tidak mudah larut dalam pandangan hidup kapitalistik.

Hal yang baru dalam era perekonomian yang terbuka sekarang ini bukannya kecepatan transaksi perdagangan dan investasi, melainkan seluruh dunia telah terbuka bagi hubungan-hubungan produksi yang kapitalistik. Perluasan perdagangan masa sekarang seluruhnya diilhami

(*imbued*) hubungan-hubungan yang bersifat kapitalistik (David Ashton, 1996:71).

1. Tujuan Pendidikan Ekonomi

Ada beberapa pendapat tentang hal tersebut. Di antaranya Lee Hansen berpendapat bahwa tujuan pendidikan ekonomi ialah menolong orang-orang muda agar begitu mereka lulus sekolah mempunyai suatu kemampuan untuk mengerti dan mampu mengambil keputusan secara nalar tentang sebagian besar masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat dan oleh mereka sendiri sebagai warga masyarakat. Hanya dengan cara inilah mereka akan dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan sebagai pengambil keputusan yang efektif (Lee Hansen, 1977:2).

Menurut George L. Fesh, tujuan pendidikan ekonomi terutama di tingkat sekolah menengah meliputi 3 hal:

- a. Menolong para pelajar menyadari kedudukannya dalam kehidupan ekonomi dan menyadarkan bahwa ilmu ekonomi memberi dasar rasional untuk mengambil berbagai keputusan ekonomi.
- b. Memberi kemampuan siswa untuk menerapkan ilmu ekonomi dalam tanggung jawabnya sebagai konsumen, produsen, sebagai pekerja, atau sebagai warga negara.
- c. Memberi andil pengetahuan dan keterampilan para pelajar dalam pendidikan pada umumnya. Melalui pelajaran ekonomi diharapkan para pelajar mengetahui tujuan-tujuan ekonomi masyarakat, mampu menggambarkan berbagai keterkaitan antara tujuan-tujuan ekonomi yang bersifat pribadi dan kepentingan masyarakat (Lee C. Deighton, 1971:187-188).

Untuk dikatakan "mengerti" tentang ekonomi menurut Hansen dibutuhkan beberapa unsur:

- a. Mempunyai kemampuan melaksanakan pendekatan yang nalar (*reasonable*) dalam arti objektif, rasional, dan sistematis.
- b. Menguasai konsep-konsep dasar dan konsep-konsep kunci.
- c. Memiliki kemampuan melihat kehidupan ekonomi yang bersifat menyeluruh.
- d. Dapat mengidentifikasi *issue-issue* ekonomi yang ada. Maksudnya memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai macam-macam *issue* ekonomi yang mungkin dihadapi baik sebagai konsumen, sebagai seorang pekerja, seorang warga negara maupun seorang majikan.
- e. Dapat menerapkan segala unsur tersebut dalam kasus-kasus tertentu (seperti melaksanakan pendekatan yang tepat, menggunakan konsep-konsep ekonomi dan mengidentifikasi *issue-issue* pada umumnya).
- f. Mengambil keputusan atau kebijaksanaan menghadapi *issue-issue* tersebut (W. Lee Hansen, 1977: 4 dan 9).

Selain tujuan pendidikan ekonomi yang masih bersifat umum, masih ada tujuan yang bersifat khusus. Sebagai contoh tujuan pengajaran bisnis internasional, menurut Calvert Scott meliputi 8 tujuan:

- a. Mengembangkan kesadaran adanya kesamaan dan perbedaan budaya antarnegara dan besarnya pengaruh variabel-variabel budaya dalam bisnis internasional.
- b. Mengembangkan pengertian makin meningkatnya kompleksitas permasalahan yang timbul dari saling ketergantungannya perdagangan antarnegara.
- c. Mengembangkan pengertian tentang besarnya sumbangan bisnis internasional terhadap pembangunan ekonomi setiap ne-

- gara, terhadap kemakmuran dan stabilitas dunia.
- d. Mengembangkan pengertian tentang besarnya peran bisnis internasional terhadap pemenuhan pasar global.
 - e. Mengembangkan kesadaran tingginya peringkat kesempatan untuk berkarir dalam bisnis internasional.
 - f. Mempersiapkan pribadi-pribadi yang terpilih untuk bekerja pada berbagai peringkat kegiatan dalam bisnis internasional.
 - g. Mengembangkan pengertian tentang kompleksitas hubungan ekonomi, sosial, maupun politik dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan konsumsi seorang warga negara yang terkait dengan lingkup pasar lokal, regional, maupun internasional.
 - h. Mempersiapkan para konsumen (warga negara) agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan umum dan bisnis internasional (Calvet Scott, 1966:195).

2. Problematik di Bidang Pendidikan

Tujuan khusus yang menjadi sasaran pencapaian mata pelajaran bisnis internasional tersebut ternyata cukup luas. Oleh karena itu untuk mencapainya membutuhkan persiapan materi dan silabi yang komprehensif; berbagai metode mengajar yang harus dikembangkan, tidak sekadar ceramah; prasarana dan sarana yang lengkap; dan kompetensi guru atau staf pengajar. Juga strategi kurikulumnya perlu diperhatikan, apakah disajikan sebagai program khusus semacam pelatihan kerja atau menyatu sebagai bagian kurikulum yang ada.

Apabila pendidikan bisnis atau pendidikan ekonomi di Indonesia khususnya untuk memenuhi kebutuhan berbagai tingkat keahlian

dan keterampilan di bidang ekonomi luar negeri belum bisa disiapkan, maka gambaran usaha untuk meningkatkan kemampuan bersaing di pasar global sulit dilaksanakan. Bukan hanya daya saing Indonesia di pasar global semakin lemah, tetapi usaha membendung serangan investor asing di dalam negeri sendiri pasti akan gagal. Bahkan kesempatan kerja di dalam negeri pun akan semakin banyak dijarah oleh para pekerja asing. Kalau di tahun 1994 tenaga asing di Indonesia sebanyak 41.000 orang, tahun 1995 menjadi sebanyak 57.000 orang dengan menghabiskan devisa sebesar US \$ 2,4 milyar. Di tahun 1996 sebanyak 78.000 orang, menghabiskan devisa US \$ 3,29 milyar, dan di tahun 2000 mungkin akan terdapat tenaga asing di Indonesia sebanyak 275.815 orang yang akan menghabiskan devisa sebesar US \$ 11,58 milyar.

Tenaga asing yang terbesar justru bukan tenaga manajer, profesional, atau tenaga penyelia, melainkan tenaga kerja pelaksana. Mereka 40,95% termasuk tenaga pelaksana dengan gaji rata-rata US \$ 1.600,- per bulan, kelompok manajer sebesar 23,83% atau 13.624 orang dengan gaji US \$ 6.250,- per bulan, tenaga profesional 11.874 orang (20,77%) rata-rata per bulan US \$ 5.000,- sedangkan tenaga penyelia sebanyak 8.254 orang (14,44%) dengan gaji US \$ 2.150,- per bulan (Emir Wiraatmadja, "Tenaga Kerja Asing Dibutuhkan, Juga Disegani" *Eksekutif*, Feb. 1997:35).

Mengapa mereka dibutuhkan dan dibayar lebih mahal dari tenaga Indonesia? Ada beberapa penyebabnya di antaranya memang mereka lebih profesional, termasuk kemampuan berbahasa asing. Juga sebagian perusahaan asing di Indonesia lebih senang sesama mereka sendiri yang mempunyai persamaan budaya, bahkan biasanya sudah termasuk dalam kontrak kerja,

tetapi masih ada alasan perbedaan upah tanpa alasan yang jelas.

Dari sudut pandang ekonomi adanya migrasi apakah Indonesia mengirim tenaga ke luar negeri atau Indonesia mengimpor tenaga asing adalah wajar. Dari sudut pandang ekonomi seluruh kekayaan dalam masyarakat hanyalah merupakan kombinasi yang terdiri dari *human and non-human capital*. Modal manusia meliputi akumulasi investasi untuk kegiatan pendidikan, latihan kerja, dan migrasi (Ehrenberg & Smith, 1957:287).

Apabila trend ini berlangsung terus, maka tidak terlalu salah pendapat yang menyatakan bahwa: "The international trade as a form of cultural imperialism that must be strictly controlled" (Robert Gilpin, 1987:172).

Belum berhasilnya tujuan dan sasaran pendidikan ekonomi, hanyalah menjadi gambaran sebagian dari permasalahan pendidikan di Indonesia, dari pendidikan tingkat TK sampai pendidikan tinggi. Permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia di antaranya meliputi: belum memadainya iklim penelitian, lemahnya manajemen kelembagaan, metode mengajar yang masih ditikberatkan pada metode ceramah, rendahnya kualitas perpustakaan, tidak memadainya peralatan dan bahan-bahan untuk mengajar. Belum terhitung kesulitan staf mengajar yang *qualified* untuk meng*up-date* materi pengajaran, rendahnya gaji dosen yang melemahnya komitmen mereka di lembaga tempat mereka bekerja karena mereka banyak yang mencari tambahan pendapatan di tempat yang lain. Juga masih banyak tergantung pada negara Barat di berbagai bidang ilmu dan sumber publikasi serta pelatihan di bidang penelitian tingkat tinggi. Mereka juga masih mengalami kesulitan bahasa. (Robert Canon, 1994. *The Quality of Teaching and Learning in Indonesian Universities; Issue and*

Challenges. Higher Education Research and Development, Vol. 13, No.2).

Memang tidak semua perguruan tinggi di Indonesia mengalami semua kesulitan tersebut, tetapi sebagian besar saya kira ada benarnya. Atas kesadaran banyaknya permasalahan yang cukup mendasar di tingkat pendidikan tinggi di Indonesia itulah maka Departemen P dan K khususnya Dirjen Dikti sejak tahun 1975 telah membuat perencanaan strategis yang dikenal dengan "Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP) 1975-1985; 1985-1995; 1996-2005. Dalam KPPTJP 1996-2005 telah digambarkan masalah-masalah pokok yang sedang dihadapi pendidikan tinggi di Indonesia sebagai kelanjutan permasalahan yang masih dihadapi yaitu:

- a. Masalah manajemen
- b. Relevansi serta mutu, dan
- c. Pemerataan pendidikan.

Usaha-usaha mengatasi serta target pencapaiannya telah dijabarkan dengan jelas (Bambang Soehendro, 1996:92). Sayangnya masalah anggaran belum secara jelas tergambar, padahal masalah anggaran pendidikan merupakan salah satu kendala yang cukup berat. permasalahan pendidikan di Indonesia akan dapat ditanggulangi hanya dengan kesadaran dan kesiapan seluruh masyarakat dan bangsa untuk ikut berperan serta di dalamnya.

Kesimpulan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan bobot yang penting pada transaksi ekonomi luar negeri. Oleh karena itu menghadapi era pasar bebas abad 21, Indonesia terus berusaha mempersiapkan diri meningkatkan kemampuan daya saing ekspornya di pasar global, dan berusaha memperkuat daya tahan

ekonomi dari guncangan ekonomi dunia yang sewaktu-waktu melanda tanpa dapat dihindari. Salah satu upaya tersebut ialah mempersiapkan peningkatan kualitas manusia Indonesia yang lebih bermutu, baik dalam arti keilmuannya, keterampilan kerja, kualitas moralnya, dan memiliki kejelasan nilai-nilai hidup sebagai bangsa Indonesia yang religius. Tanpa kejelasan nilai-nilai hidupnya akan mudah terseret oleh permainan ekonomi global yang diilhami nilai-nilai budaya kapitalistik yang berisi pertarungan kalah menang. Yang kuat menang dan yang lemah tergusur sehingga sekiranya dari segi perkembangan ekonomi Indonesia berhasil tetapi hanya didominasi sebagian kecil bangsa Indonesia, maka cita-cita bangsa yang adil-merata tidak akan tercapai. Justru keberhasilan ekonomi Indonesia akan dibarengi dengan kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin melebar.

Di bidang pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan ekonomi, masih banyak sekali permasalahan yang harus diatasi. Selama bidang pendidikan ini belum bertambah baik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan untuk mengisi tenaga kerja yang memiliki kualifikasi, maka yang akan terjadi ialah semakin banyaknya tenaga asing yang menang bersaing di Indonesia. Tenaga asing tidak hanya terdiri dari para manajer dan tenaga-tenaga ahli saja tetapi termasuk tenaga-tenaga pelaksana. Apabila hal ini terjadi, maka arena ekonomi global hanya merupakan bentuk baru dari penetrasi budaya asing dalam bentuk kekuatan ekonomi asing yang masuk kembali ke negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Situasi tersebut akan melanggengkan situasi ekonomi dualistik, seperti pada zaman penjajahan, yang tentu saja hal itu bukan tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. □

Daftar Pustaka

- Abdul Hadi WM, 1989 *"Antara Raushan Dhamir dan Raushan Fikr" Ulumul Qor'an Vol. 2, 1.*
- Ashton, David & Green Francis, 1996. *Education, Training and The Global Economy*, Cheltenham: Edward Elger.
- Bambang Soehendro, 1996. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1996-2005*. Jakarta: Departemen P & K Dirjen Dikti.
- Banks, James A., 1974 *Teaching Strategies for The Social Studies*. Massachusetts: Addison-westly Publishing Co.
- Canon, Robert A. & Siti Utari Sri Widodo, 1994. *"Improving The Quality of Teaching and Learning in Indonesia Universitas Universitas; Issues and Challenges". Higher Education Research and Development, Vol. 13, No. 2.*
- Deighton, Lee C., 1991. *Encyclopedia of Education*. New York: The McMillan Publishing Co.
- Didin S. Damanhuri, 1996. *"Bunga Tinggi Siapa Untung". Gatra 7 Desember.*
- Ehrenbert, Ronald G. & Robert Smith S. 1997. *Modern Labor Economics. Theory and Public Policy*. Massachusetts: Addison-Wesley Educational Publishing Inc.
- Emir Wiraatmadja, 1997. *"Tenaga Kerja Asing Dibutuhkan, Juga Disegani". Eksekutif*. No. 212 Februari.
- Fraenkel, Jack R., 1971. *Helping Students Think and Value*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Frostig, Marriane, 1976. *Education for Dignity*. New York: Grune & Straton.
- Gilpin, Robert, 1987. *The Political Economy of International Relation*. New Jersey: Princeton University.

- Hansen, Lee W., 1977. *A Framework for Teaching Economics: Basic Concept*. Joint Council on Economic Education.
- Heru Nugroho, 1997. *"Kekuasaan Uang dalam Masyarakat Modern"*. Yogyakarta: *Berita Nasional* 7 Mei.
- Husted, Steven & Melvin Michael, 1995. *International Economics*. New York: Harper Collins College Publication.
- Kennedy, Paul, 1993. *Preparing for The Twenty First Century*. New York: Random House.
- Moh. Natsir, 1970. *"Islam dan Akal Merdeka"*. Jakarta: Hudaya.
- Nyerere, Julius K., 1990. *The Challenge to The South: The report of South Commission*. New York: Oxford University Press.
- Osman Bakar, 1991. *Tauhid and Science*. Kuala Lumpur, Meziza Sdn Bhd.
- Prechel, Harland, 1985. *The Effect of Export, Public Debt and Development on Income Inequality. The Sociological Quarterly*. Vol. 26 No. 2, Jai Inc.
- Prehn, Edward C., 1965. *Teaching High School Economics. The Analytical Approach*. New York: Pitman Publishing.
- Richardson, David J., 1995. *"Income Inequality and Trade: How to Think, What to Conclude"*. *Journal of economic Perspectives*. Vol. 9 No. 3 Summer.
- Rose, Colin & Malcolm Nicholl J., 1997. *Accelerated Learning for The 21 st Century*. New York: Delacorte Press.
- Scott, James Calvert, 1996. *Providing Instruction for and About International Business* dalam Perreault heidi R., *Classroom Strategies: Methodology of Business Education*. Virginia: National Business Education Association.
- Soedjatmoko, 1991. *Soedjatmoko dan Keprihatinan Masa Depan*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Soeharto, Presiden, 1997. *"Agama Landasan Etika Moral Pembangunan"*. *Angkatan bersenjata*, 14 April.
- Sutrisno Hadi, 1997. *Metodologi Penelitian Dalam Ilmu Psikologi: Suatu Tinjauan Filsafat*, dalam *Metodologi Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Ilmu-ilmu Kemasyarakatan*, Yogyakarta: Sekretaris Pendidikan Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Unviersitas Gadjah mada.
- Syahirul Alim, RHA, MSc., 1983. *Menuju Persaksian* Yogyakarta: Salahuddin Press.
- Syamsul Arifin, 1997. *"Pendidikan Agama dan Perubahan"*. *Republika* 6 dan 7 Mei.
- Teicher, Ulrich, *Enhancing Productivity: Higher Education and a Changing Job Requirement* dalam *Higher Education & Human Resource Development in The Asia Pasific for The 21 st Century: A World Congress*. Manila, Philipines, June 23-25-1997.
- Thurow, Lester C., 1981. *The Zero Sum Society*. Auckland, New Zealand: Penguin Books.
- , 1996. *The Future of Capitalism*, London: Nicholas Breley Publishing.
- Torrance, Paul E., 1963. *Education and Creative Potential*. Minneapolis: The University of Minisota Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

